



Media: Tribun Jogja

Hari: Senin

Tanggal: 17 April 2017

Halaman: 1

NEWS ANALYSIS Dr Dewanti
Sekretaris Pustal UGM

Pusat Masih Permudah Pertumbuhan Kendaraan

MENANGANI Menangani kepadatan kendaraan dan kemacetan lalu lintas jangan hanya bertumpu pada Dinas Perhubungan (Dishub) saja. Ini merupakan persoalan lintas sektor dan memiliki rantai yang panjang dengan didukung kebijakan dari pemerintah pusat dan strategi pemerintah daerah yang sinkron.

● halaman 11

Pusat Masih Permudah

● Sambungan Hal 1

Sayangnya, berbagai strategi pemerintah atau instansi tingkat daerah selalu kalah cepat dengan pertumbuhan kendaraan tiap tahunnya. Ada tabrakan regulasi, pemerintah pusat masih memudahkan pertumbuhan kendaraan yang tidak sebanding dengan tingkat pertumbuhan jalan di daerah.

Walaupun harus diakui, membangun jalan hanya solusi sesaat, selama pertumbuhan volume kendaraan tidak diatur pemerintah. Faktanya wilayah perkotaan makin sempit sehingga penggunaan ruang jalan ha-

rus makin efisien. Kendaraan atau transportasi umum menjadi salah satu kunci untuk mengurangi kepadatan.

Dishub Yogyakarta sudah mengarah kesana dengan penambahan armada bus Trans Jogja beserta trayeknya pada April mendatang. Tugas berat menanti, yakni memperbaiki kualitas pelayanan dan menggaet masyarakat untuk berpindah ke transportasi massal.

Hal tersebut tentu tidak mudah karena menjadi pekerjaan rumah pemerintah kita selama ini. Lantaran ketika pemerintah daerah sudah mengatur strategi melalui transportasi massal maupun pembangunan park and ride, tetap saja selalu kalah cepat dengan pembu-

at regulator yang meloloskan pertumbuhan kendaraan.

Mengubah mindset masyarakat untuk menggunakan transportasi massal juga bukan hal yang mudah. Masyarakat perlu contoh dan merasakan langsung, keuntungan dari menggunakan transportasi massal. Tentunya didukung oleh lingkungan sekitarnya.

Sekarang adalah bagaimana memupuk kesadaran masyarakat, mengencakan untuk menggunakan transportasi dengan dibarengi perbaikan layanan. Di sisi lain, perlu sebuah kebijakan daerah yang bisa membatasi jumlah kendaraan pribadi masuk wilayah perkotaan, bisa dengan park and ride maupun road pricing atau jalan berbayar. (gll)

PENDAPAT PUBLIK

Arif Rahman Hakim
JIKA parkir di pusat kota misalnya Rp 100 ribu/jam (mobil) atau Rp 50 ribu / jam (motor) dan masuk PAD, orang tentu akan enggan bawa kendaraan dan pilih transportasi publik. Selanjutnya pemerintah tinggal menyediakannya.

Tri Hastono
POLA kelola lalu lintas dan parkir harus diubah. Buat single gate sekaligus drop zone dan tempat tunggu (parkir) bus wisata di Jogja. Untuk masuk kota disediakan moda perkotaan yang representatif.

Nisbar Munandar
KEBIJAKAN pemerintah pusat yang memberi kemudahan untuk pembelian kendaraan bermotor demi bisnis otomotif yang tidak diimbangi dengan penambahan ruas jalan juga menjadi masalah.

1. ☐ Netral ☐ Biasa ☐ Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005